

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi)**

**POPY NURHAFNI**

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berwibawa bersih, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi masyarakat. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder serta melakukan penelitian langsung ke Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum dalam penjatuhan sanksi pemberhentian Pegawai Negeri diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Prosedur pemberhentian PNS di BKPSDM Kota Tebing Tinggi adalah dilakukan proses pemanggilan secara tertulis, melakukan pemeriksaan langsung oleh atasan baik secara tatap muka langsung ataupun virtual dan penjatuhan hukuman dan penyampaian keputusan oleh pejabat yang lebih tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk serta penyampaian hukuman 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan serta hambatan yang dihadapi adalah lambatnya proses administrasi penjatuhan hukuman disiplin dan rendahnya kepedulian atasan dalam melakukan pengawasan terhadap kehadiran PNS yang masih dilakukan secara manual maka upaya solusi untuk mengatasi hambatan adalah meningkatkan komunikasi, konsultasi, koordinasi kepada OPD untuk menyampaikan ketentuan dalam PP No. 94 tahun 2021 serta menggunakan dan mengembangkan sistem absensi PNS yang terintegrasi dan online.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,  
Pegawai Negeri Sipil, Pelanggaran Disiplin.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL REVIEW TERMINATION OF CIVIL SERVANTS WHO COMMAND DISCIPLINE VIOLATIONS (Research Study at the Office of the Human Resource Empowerment Agency in the City Government of Tebing Tinggi)**

**POPY NURHAFNI**

*Efforts to achieve national goals require civil servants who are full of loyalty and obedience to Pancasila and the 1945 Constitution, the state and government are unified, have a good mentality, are authoritative, have clean authority, are efficient and effective, are of high quality, have a high awareness of his responsibilities as a state apparatus, a servant of the state, and a servant of society. One indication of the low quality of regional civil servants is the existence of disciplinary violations that are often committed by regional civil servants.*

*The research method used is research on a combination of normative juridical law and empirical juridical, namely research carried out by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials and conducting research directly to the City Government Personnel and Human Resources Empowerment Agency (BKPSDM) High cliff. This research is descriptive analysis in nature, namely research that describes, examines, explains and analyzes laws and regulations. The analysis in this study was carried out qualitatively.*

*Based on the results of the study, the legal arrangements for imposing sanctions on dismissing civil servants are regulated in Law no. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus and PP No. 94 of 2021 concerning Discipline for Civil Servants. The procedure for dismissing civil servants at BKPSDM Tebing Tinggi City is to carry out a written summons process, carry out direct examinations by superiors either face-to-face or virtual and imposition of sentences and delivery of decisions by higher officials or other appointed officials and delivery of punishment 14 working days from decisions are made and the obstacles encountered are the slow administrative process of imposing disciplinary punishment and the low concern of superiors in supervising the presence of civil servants which is still done manually. 94 of 2021 and use and develop an integrated and online PNS attendance system.*

**Keywords : Juridical Review, Dismissal of Civil Servants, Civil Servants, Violations of Discipline.**